

AZAS-AZAS DAN PENGERTIAN KEMANDIRIAN POLRI

Oleh : *Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Jacky Mardono*
(Mantan ASKAMTIBMAS KASUM ABRI)

Mulai 1 Juli 1999, Sapta Marga tidak lagi diucapkan pada upacara-upacara yang diselenggarakan di lingkungan Polri.

Memang Sapta Marga sebagai azas atau pedoman hidup, pada mulanya hanya berlaku bagi anggota TNI/Angkatan Perang RI.

Teks asli Sapta Marga butir ke-3 sampai dengan ke-7, diawali dengan kata-kata :

Kami prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia, dan seterusnya.

Setelah Polri dan TNI diintegrasikan kedalam ABRI, maka kata-kata "APRI" dirubah menjadi "ABRI".

Sebelum integrasi ABRI, azas-azas dan pedoman hidup bagi Polri dirubah menjadi "ABRI".

Dalam rangka menyempurnakan azas-azas pelaksanaan tugas Polri, marilah kita simak

butir ke-3 Sapta Marga yang menyatakan sebagai berikut :

Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan kedilan.

Butir tersebut kiranya sangat tepat apabila dijadikan azas pelaksanaan tugas Polri, karena butir tersebut mengisyaratkan, bahwa Polri dalam membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Meha Esa.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



Membela kejujuran, kebenaran dan keadilan adalah identik dengan menegakkan hukum, di mana Polri dilandasi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukannya "ketakutan" kepada pimpinan maupun "sang prabu".

Konsekuensi butir tersebut, (anggauta) Polri harus berani, kalau perlu Tahajud dulu, mengatakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah.

Yang salah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang benar jangan direkayasa agar jadi salah.

Butir ke-3 Sapta Marga juga dapat dijadikan bahan introspeksi, mungkinkah kasus 27 Juli 1996 terjadi, apabila setiap anggauta ABRI (termasuk Polri) memegang teguh butir Sapta Marga tersebut.

Setelah terjadi kasus 27 Juli 1996, yakni benturan fisik antara PDI-Suryadi dengan PDI-Megawati, timbul suara-suara agar Polri keluar dari ABRI, sehingga Polri terbebas dari "patuh dan taat kepada pimpinan" sebagaimana tercantum dalam Sapta Marga butir ke-6.

Sapta Marga butir ke-5 menyatakan antara lain :

.....
memegang teguh disiplin,
patuh dan taat kepada pimpinan.
.....

Namun butir tersebut ada kelanjutannya, yakni :

.....
serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Masalah menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit ini, tidak hanya berlaku bagi "yang dipimpin", tetapi berlaku juga bagi "yang memimpin"! Pimpinan yang menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti perintahnya tidak akan "neko-neko", dan pasti akan dipatuhi dengan penuh keikhlasan oleh yang dipimpin.

Perlu kita renungkan apakah dengan modal "Tri Brata" dan "Catur Prasetya", Polri telah memiliki azas-azas yang menunjukkan sifat kemandiriannya secara filosofis.

Tidak tertutup kemungkinan, Sapta Marga butir ke-3 akan dijadikan motivasi bagi TNI, untuk mencampuri bidang penegakan hukum, dengan dalih penegakan hukum yang dilakukan Polri tidak benar.

Dalam rangka pembinaan Kamtibmas, ada sebagian kegiatan operasional Polri merupakan sub-sistem dari CJS (Criminal Justice System). Sub-sistem CJS lainnya adalah penasehat hukum, penuntut umum dan hakim.

Kemandirian Polri di bidang

operasional hendaknya diartikan, tidak ada instansi di luar CJS, yang dapat mempengaruhi atau mencampuri tugas Polri dalam rangka pengakuan hukum.

Sedangkan untuk sesama "member" CJS, hubungan tata cara kerja telah diatur dalam KUHAP.

Berbicara kepada siapa Polri bertanggung jawab, hendaknya tetap dalam rangka supremasi hukum, dalam arti Polri tidak bertanggung jawab kepada atasan, namun kepada hukum.

Karena itu, siapa yang mengangkat pejabat di lingkungan Polri, jangan punya anggapan bisa memerintah senaknya kepada Polri.

Penggunaan upaya paksa oleh Polri bukanlah atas dasar perintah atasan, namun atas dasar keyakinan Penyidik.

John Edgar Hoover, mampu bertahan sebagai direktur FBI sampai akhir hayatnya (usia 72 tahun), selama 48 tahun memimpin FBI, tanpa pandang presidennya dari partai mana.

Mengapa demikian, karena JE Hoover mampu membawa FBI benar-benar sebagai "law enforcer" dan bukannya sebagai "governments enforcer".

Di negara yang merupakan "biangnya" demokrasi dan liberalisme ternyata direktur FBI diangkat oleh presiden dan bukannya hasil pemilihan.

Di bidang operasional di luar CJS, memang Polri wajib berkoordinasi dengan instansi terkait, atas dasar wewenang dan kepentingan masing-masing instansi.

Dasar koordinasi hendaknya adalah "nebon ein ander" bukannya "nach ein ander".

Siskamling tidak akan berhasil, tanpa bantuan RW/RT.

Kemandirian Polri di bidang pembinaan hendaknya dikaitkan dengan jumlah personil dan peralatan yang dimiliki Polri.

Untuk ini tentu diperlukan suatu organisasi Polri yang "tanpa perantara" dapat berhubungan badan-badan yang mengelola APBN.

Hal ini juga untuk menghindari agar Polri tidak mendapat barang-barang bekas maupun barang-barang yang diapkir.

Mungkin perlu kita pelajari, mengapa US Marino Corp tidak melupakan bagian dari US Navy.

Mungkin karena penugasan US Marine Corps demikian luasnya, sampai-sampai "Satpam" di Kedubes AS adalah anggota marinir.

Demikian sekedar urun rembug, semoga bermanfaat.